

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Perencanaan Anggaran DKI Dinilai Buruk

JAKARTA – Perencanaan anggaran DKI dinilai buruk. Banyak kegagalan kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menemukan kegagalan kegiatan yang berujung viral di media sosial seperti pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar, pembelian server Jakarta Smart City Rp65 miliar, serta pengadaan komputer Rp132 miliar.

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius merumuskan rancangan APBD 2020. Itu menyusul ditemukannya usulan kegiatan yang terindikasi pemborosan dalam dokumen KUA-PPAS.

Dia juga mengajak publik membantu mengawasi proses penganggaran yang dilakukan pemerintah. Masyarakat harus mengetahui seluruh kegiatan karena uang yang tersimpan itu milik rakyat. "Kami minta DKI transparan agar masyarakat bisa mengawasi juga," kata William di DPRD DKI Jakarta kemarin.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai banyak kegagalan dalam KUA-PPAS akibat buruknya perencanaan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk itu, setiap kali pertemuan pembahasan per komisi, dia

selalu menekankan anggaran prioritas sehingga ketika menemukan anggaran tidak bermanfaat, ketubadan anggaran langsung mencoretnya. "KUA-PPAS itu awalnya perencanaan SKPD. Kalau saya melihat dari beberapa komisi, ini SKPD-nya enggak bisa tegas menganggarkan apa yang penting buat masyarakat," ungkapnya.

Dia meminta Anies tegas mencopot pejabat yang merencanakan anggaran tidak masuk akal seperti pengadaan lem Aibon atau perekrutan *influencer*. Pras juga tidak peduli dengan waktu pembahasan yang mempunyai batas hingga 30 November. "Kalau bicara soal pembahasan, tidak ada masalah mepet atau tidak mepet, tapi bagaimana implementasinya bisa sampai publik dan dapat digunakan dengan baik," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Mahendra Satria Wirawan berjanji meningkatkan pengawasan, penyisiran, dan pengecekan komponen hasil usulan dari SKPD dalam menyusun APBD 2020. Saat ini prosesnya belum sampai *input* komponen. "Perlu diakui masih ada SKPD yang memasukkan komponen yang tidak sesuai.



Itu kami sadari, pengawasan memerlukan pendalaman juga di SKPD," ucapnya.

SKPD mulai memasukkan detail kegiatan *die-budgeting* pada Maret pekan IV hingga Juli pekan I. Namun, karena sistem *e-budgeting* mengharuskan *input* komponen sebagai pembentuk harga, ini mengakibatkan beberapa kegiatan belum memiliki komponen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan semua SKPD melakukan penyisiran ulang. Arahan terakhir Anies disampaikan sebanyak dua kali pada Oktober yakni pada 9 dan 23 Oktober 2019. Video arahan berdurasi sekitar satu jam itu diunggah di YouTube oleh Dinas Informasi dan Komunikasi DKI.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengungkapkan, e-komponen pada beberapa kegiatan yang menjadi usulan anggaran 2020 masih bersifat sementara dan akan dibahas di DPRD. Dinasnya akan memperbaiki dan terus menyisir usulan APBD.

"Sempat *ter-input* dan terpublikasi ada anggaran *influencer* Rp5 miliar. Nah, ini kami jelaskan bahwa detail komponen di dalamnya tidak seperti itu membacanya, tapi lebih berisi *item* kegiatan yang tujuan akhirnya mempromosikan kegiatan pariwisata di media. Adabelanja media, *supporting event*, dan lain-lain," ungkap Edy.

Terkait pengadaan lem Aibon Rp82,8 miliar, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi menyebut ada salah tulis dalam penulisan anggaran untuk pembelian lem Aibon.

● bima setiyadi/yan yusuf

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

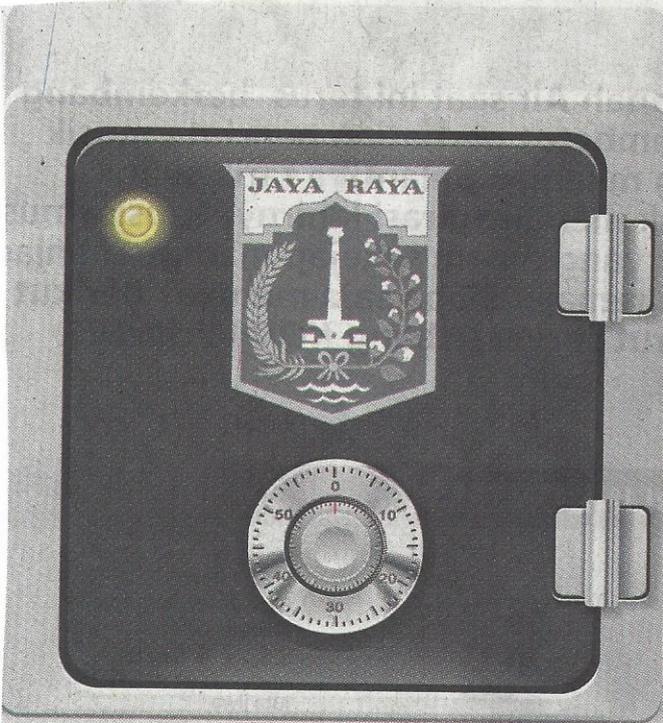
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Perencanaan Anggaran DKI Dinilai Buruk

TAK TRANSPARAN

Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak transparan dalam merencanakan anggaran tahun depan. Buktinya beberapa anggaran janggal mencuat ke publik seperti pengadaan lem aibon, pulpen, dan perekrutan *influencer* untuk mempromosikan wisata.



TEMUAN ANGGARAN

- 1 Lem Aibon **Rp82,8 miliar**
- 2 Pembelian komputer **Rp132 miliar** sebanyak 7.313 unit dengan satu unitnya seharga Rp15 juta.
- 3 Pembelian pulpen **Rp123 miliar** dengan harga satuannya Rp105.000. Sementara, harga pulpen di pasaran rata-rata Rp1.500 - Rp2.500 per unit.
- 4 Lima *influencer* **Rp5 miliar** untuk mempromosikan pariwisata.
- 5 Pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City **Rp65 miliar** untuk pembelian *smart storage* dan komponen lain.



APBD DKI JAKARTA

2017: Rp70,1 triliun

2018: Rp77,1 triliun

2019: Rp89 triliun

KUA-PPAS itu awalnya kan perencanaan SKPD. Kalau saya melihat dari beberapa komisi, SKPD ini enggak bisa tegas menganggarkan apa yang penting buat masyarakat.

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta

Sumber: DPRD DKI Jakarta

